

## **Ketepatan Penyampaian Laporan Keuangan Desa di Kabupaten Bone**

Nurmiati Irvan  
Univeristas Patria Artha  
nurmiati@patria-artha.ac.id

Fina Diana  
Universitas Patria Artha  
Fina71diana@gmail.com

Murbayani  
Universitas Patria Artha  
murnibahari@yahoo.co.id

Bastian Lubis  
Universitas Patria Artha  
Lubis.bastian@patria-artha.ac.id

Andi Risnah  
Universitas Patria Artha  
Andi.risnah12@gmail.com

### **ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bone dengan tujuan untuk mengetahui ketepatan penyampaian laporan keuangan desa. jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh kepala desa atau aparat pengelola keuangan desa. dengan menggunakan instrument penelitian berupa kuesioner yang merupakan sumber data primer dan data sekunder berupa laporan keuangan desa. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik Deskriptif yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. Selanjutnya dilakukan reduksi data dengan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang terpenting, kemudian setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah menunjukkan data. Setelah dilakukan analisis data maka hasil yang diperoleh pada penelitian adalah masih terdapat beberapa desa yang tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain kualitas sumber daya manusia yang merupakan kunci dari terciptanya laporan keuangan yang berkualitas yang didukung oleh teknologi informasi dan sistem pengendalian intern.

Kata Kunci : Laporan Keuangan, SDM, Teknologi Informasi, sistem pengendalian intern

## **ABSTRACT**

This research was conducted in Bone Regency with the aim of knowing the accuracy of submitting village financial reports. this type of research is quantitative research. The population in this study were all village heads or village financial management apparatus. by using a research instrument in the form of a questionnaire which is a source of primary data and secondary data in the form of village financial reports. The data analysis technique in this study uses descriptive statistics, namely statistics used to analyze the data that has been collected as it is without the intention of making generally accepted conclusions or generalizations. Furthermore, data reduction is carried out by selecting the main things, focusing on the most important things, then after the data is reduced, the next step is to show the data. After analyzing the data, the results obtained in the study are that there are still some villages that are not timely in submitting their financial reports, this is caused by several factors, including the quality of human resources which is the key to the creation of quality financial reports supported by information technology. and internal control system.

Keywords: Financial Report, HR, Information Technology, internal control system

## **A. PENDAHULUAN**

Laporan Keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang membutuhkan dalam rangka pengambilan keputusan (Baridwan, 2014:33). Laporan keuangan dapat membantu membuat keputusan untuk investasi, kredit dan keputusan jika dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi investor, kreditur dan pemakai lainnya .

Laporan keuangan yang merupakan laporan pertanggung jawaban manajemen kepada pemegang saham perusahaan atas pengelolaan perusahaan yang dipercayakan kepadanya, dan juga kepada pihak-pihak eksternal perusahaan. (Rahardjo, 2017). Laporan keuangan menyediakan informasi yang terdiri dari neraca, laba rugi, laporan perubahan modal dan arus kas suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi (Darminto dan Juliaty, 2012). Informasi terkait posisi keuangan sangat dibutuhkan dalam mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas.

Informasi sebaiknya memiliki kualitas relevan sehingga dapat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam proses pengambilan keputusan khususnya keputusan ekonomi. Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya atau informasi tidak disampaikan tepat waktu, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya, hal ini dinyatakan dalam Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK No. 1

tahun 2018, paragraph 15.

Menurut Kadir (2011), ketepatan waktu penyerahan laporan keuangan merupakan hal penting dalam memberikan informasi akuntansi. Informasi yang telah lama akan jarang digunakan oleh partisipan pasar dalam proses pembuatan keputusan investasi, karena informasi yang disampaikan tersebut sudah kehilangan nilai relevansinya.

Pelaporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi pada pihak-pihak internal maupun eksternal perusahaan yang membutuhkan mengenai kinerja dan posisi keuangan untuk periode tertentu yang dapat digunakan sebagai alat untuk pengambilan keputusan ekonomi. Hal ini sesuai dengan pendapat Ridwan S. Sundjaja dan Inge Berlian (2003: 76) bahwa laporan keuangan adalah suatu laporan yang menggambarkan hasil dari proses akuntansi yang digunakan sebagai alat komunikasi antar data keuangan/aktivitas perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data/aktivitas tersebut.

Penyajian laporan keuangan seperti yang tercantum pada PP Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat sehingga dapat digunakan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Penyajian laporan keuangan tersebut sebaiknya menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran, menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan serta hasil-hasil yang telah dicapai, menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya, menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk berasal dari pungutan pajak dan pinjaman, menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan dapat mempengaruhi nilai laporan keuangan tersebut. Informasi memiliki nilai apabila informasi tersebut memiliki kandungan yang dapat digunakan oleh para pengambil keputusan (Scoot, 2000: 12). Jadi elemen pokok bagi catatan laporan keuangan yang memadai adalah ketepatan waktu pelaporan keuangan, karena akan memberikan andil bagi kinerja yang efisien terhadap

pasar saham sebagai fungsi evaluasi dan penetapan harga, serta dapat mengurangi informasi yang asimetri.

Salah satu prasyarat utama bagi peningkatan harga saham suatu perusahaan, adalah ketepatan waktu penyajian laporan keuangan karena dengan tersedianya informasi laporan keuangan secara tepat waktu dapat berguna bagi pembuat keputusan pada saat dibutuhkan sebelum informasi tersebut kehilangan kemampuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan serta menyesuaikan dengan perkembangan pasar modal khususnya di Indonesia (Purbowati, 2014).

Penyampaian laporan pertanggungjawaban yang berupa laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini merupakan upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dana akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan. Laporan Keuangan Pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Laporan Keuangan Pemerintah setelah melalui proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selanjutnya disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum. Komponen keuangan yang disampaikan tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pemerintah Daerah selalu menekankan agar dalam pengelolaan keuangan harus transparan, akuntabel, partisipatif kepada setiap satuan kerja di wilayah tingkatan desa, sehingga kinerja pemerintah desa tidak keluar dari prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan Negara dalam melakukan pengelolaan keuangan sampai pada tahap pelaporan dan tanggungjawab keuangan tersebut. Hal ini didukung oleh peraturan terkait yang dengan implementasi otonomi daerah dan berkenaan dengan pengelolaan keuangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan kebijakan desa berupa Pengelolaan keuangan desa. Desa merupakan daerah otonom terendah dalam sistem pemerintahan Indonesia, sehingga Desa memiliki keterbatasan dalam hal pembiayaan segala urusan pemerintahannya. Sumber pendapatan desa selain diperoleh dari pendapatan

asli desa juga dapat diperoleh dari dana bagi hasil pajak daerah kabupaten atau kota, dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, bantuan keuangan dari pemerintah, dan hibah serta sumbangan dari pihak ketiga, hal ini tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pasal 68.

Desa yang maju, mandiri dan demokratis dapat terwujud jika tersedia anggaran pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Anggaran tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang menyebutkan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Semua proses pengelolaan dana desa harus didasari asas transparansi, akuntabel dan partisipatif. Mengingat salah satu pilarnya adalah akuntabilitas maka dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik dalam pengelolaan dana desa, (Astri, dkk 2016).

Adanya target penggunaan dana yang belum terealisasi dengan baik, mengindikasikan bahwa banyak faktor yang dapat menghambat akuntabilitas pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan oleh pemerintah Desa. Salah satu hambatan yang ditemui adalah aparat Desa yang kurang profesional dalam menyusun pelaporan keuangan desa, sehingga mempengaruhi ketepatan waktu pertanggungjawaban keuangan Desa. Hal ini sesuai dengan pendapat Sukmawan (2013) bahwa kapasitas aparatur desa sebagai pelaksana kebijakan merupakan faktor penting yang menunjang keberhasilan pelaksanaan program-program yang dibiayai oleh alokasi dana desa. Kemampuan dan keterampilan aparatur desa sebagai pelaksana kebijakan merupakan dasar dari pelaksanaan pemerintahan khususnya di bidang keuangan dalam mengelola alokasi dana desa

Berdasarkan struktur organisasi dan tata kerja yang ada, maka penyusunan laporan keuangan desa di Kabupaten Bone dikerjakan oleh aparat keuangan desa yang membidangi bagian keuangan dan pelaporan, sedangkan kepala desa bertugas memeriksa dan mencocokkan semua laporan keuangan yang ada sebelum ditandatangani untuk dikirim ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten.

Berdasarkan gambaran yang telah dikemukakan, penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut : a. Bagaimana ketepatan penyampaian laporan keuangan desa di

Kabupaten Bone; b. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan ketidaktepatan penyampaian laporan keuangan desa di Kabupaten Bone.

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang spesifikasinya adalah sistematis, sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya disusun secara terencana dan terstruktur dengan jelas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif yang menggambarkan populasi yang diteliti.

Analisis data penelitian dilakukan dengan mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, metabulasi data berdasarkan variabel serta menyajikan data tiap variabel, selanjutnya melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah.

Teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif yaitu statistik yang bertujuan untuk menganalisis data yang telah terkumpul tanpa membuat generalisasi atau kesimpulan yang berlaku umum. Tahap selanjutnya adalah melakukan reduksi data yaitu memilih hal-hal pokok yang terkait dengan penelitian, selanjutnya memfokuskan pada hal-hal yang terpenting, kemudian setelah mereduksi data maka langkah selanjutnya adalah menunjukkan data tersebut.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

#### **1. Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan distribusi frekuensi sebagai alat analisis utama. Berikut adalah hasil analisis distribusi frekuensi tanggapan responden terkait tentang ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan desa di Kabupaten Bone.

**Tabel 1. Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Desa di Kabupaten Bone**

<b>Ketepatan Waktu</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase (%)</b>
Tepat Waktu	49	81,7
Tidak Tepat Waktu	11	18,3
Total	60	100

Sumber: Data diolah, Tahun 2021

Berdasarkan hasil analisis distribusi frekuensi pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa terdapat 60 desa yang menjadi sampel dalam penelitian ini dimana ada 49 desa atau sebesar

81,7% yang menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu dan terdapat 11 desa atau sebesar 18,3% yang menyampaikan laporan keuangannya secara tidak tepat waktu.

## 2. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Ketidaktepatan Penyampaian Laporan Keuangan Desa Di Kabupaten Bone

Beberapa faktor yang menyebabkan ketidaktepatan penyampaian laporan keuangan desa di Kabupaten Bone terdiri dari: kualitas sumber daya manusia, teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern.

### a. Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas SDM adalah seluruh potensi yang dimiliki oleh seseorang untuk mewujudkan perannya sesuai dengan tanggung jawabnya terhadap pekerjaan. Pengukuran kualitas SDM menggunakan indikator: pendidikan, pengalaman, pengetahuan dan keterampilan. Berikut adalah distribusi frekuensi tanggapan responden terkait dengan kualitas sumber daya manusia petugas penyusun laporan keuangan desa di Kabupaten Bone

**Tabel 2. Kualitas Sumber Daya Manusia Petugas Penyusun Laporan Keuangan Desa di Kabupaten Bone**

Indikator	Frekuensi dan Persentase					Total
	SS	S	KS	TS	STS	F
	F %	F %	F %	F %	F %	%
Pendidikan	18 (30)	31 (51,7)	11 (18,3)	0 (0)	0 (0)	60 (100)
Pengalaman	17 (28,3)	24 (40)	19 (31,7)	0 (0)	0 (0)	60 (100)
Pengetahuan	21 (35)	28 (46,7)	8 (13,3)	3 (5)	0 (0)	60 (100)

Keterampilan	14 (23,3)	28 (46,7)	18 (30)	0 (0)	0 (0)	60 (100)
--------------	--------------	--------------	------------	----------	----------	-------------

Sumber: Data diolah, Tahun 2021

Berdasarkan hasil analisis distribusi frekuensi pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa terdapat 60 desa yang menjadi sampel dalam penelitian ini dimana ada 18 orang atau sebesar 30% penyusun laporan keuangan desa yang memberikan pendapat sangat setuju kemudian terdapat 31 orang atau sebesar 51,7% yang memberikan pendapat setuju dan terdapat 11 orang atau sebesar 18,3% yang memberikan pendapat kurang setuju dan tidak ada yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju terhadap pernyataan pendidikan para pengelola laporan keuangan desa mempunyai pengaruh bagi ketepatan waktu dalam penyusunan sebuah laporan keuangan

Pernyataan tentang pengalaman pengelola laporan keuangan berpengaruh terhadap ketepatan penyusunan laporan keuangan umumnya para responden memberikan pendapat setuju yaitu terdapat 24 responden atau sebanyak 40% kemudian memberikan pendapat kurang setuju sebesar 19 orang atau sebanyak 31,7% lalu sebesar 17 orang atau sebanyak 28,3% yang memberikan pendapat sangat setuju dan tidak ada yang memberikan pendapat tidak setuju terlebih lagi memberikan pendapat sangat tidak setuju.

Pernyataan tentang pengetahuan pengelola laporan keuangan berpengaruh terhadap ketepatan penyusunan laporan keuangan umumnya responden memberikan pendapat setuju yaitu sebesar 28 orang atau sebanyak 46,7% kemudian memberikan pendapat setuju sebesar 21 orang atau sebanyak 35% lalu sebesar 8 orang atau sebanyak 13,3% yang memberikan pendapat kurang setuju dan tidak ada yang menyatakan tidak setuju terlebih lagi memberikan pendapat sangat tidak setuju.

Pernyataan tentang keterampilan pengelola laporan keuangan berpengaruh terhadap ketepatan penyusunan laporan keuangan umumnya responden terlebih lagi memberikan pendapat setuju yaitu sebesar 28 orang atau sebanyak 46,7% kemudian terlebih lagi memberikan pendapat kurang setuju sebesar 18 orang atau sebanyak 30% lalu sebesar 14 orang atau sebanyak 23,3% yang terlebih lagi memberikan pendapat sangat setuju dan tidak ada yang menyatakan tidak setuju terlebih lagi memberikan pendapat sangat tidak setuju.

b. Teknologi Informasi

Penggunaan teknologi informasi merupakan suatu usaha peningkatan kualitas pelayanan publik agar lebih efektif serta efisien melalui penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis digitalisasi. Indikator untuk mengukur teknologi informasi adalah: kecukupan perangkat IT, dukungan jaringan internet, sistem komputerisasi, dan sistem IT yang terintegrasi. Berikut adalah distribusi frekuensi tanggapan responden terkait dengan teknologi informasi dalam mendukung penyusunan laporan keuangan desa di Kabupaten Bone

**Tabel 3. Teknologi Informasi yang Mendukung Penyusunan Laporan Keuangan Desa di Kabupaten Bone**

Indikator	Frekuensi dan Persentase					Total
	SS	S	KS	TS	STS	F
	F %	F %	F %	F %	F %	%
Kecukupan Perangkat IT	4 (6,7)	27 (45)	24 (40)	4 (6,7)	1 (1,7)	60 (100)
Dukungan Jaringan Internet	8 (13,3)	26 (43,3)	22 (36,7)	3 (5)	1 (1,7)	60 (100)
Sistem Komputerisasi	8 (13,3)	23 (38,3)	25 (41,7)	3 (5)	1 (1,7)	60 (100)
Sistem IT yang Terintegrasi	10 (16,7)	32 (53,3)	16 (26,7)	2 (3,3)	0 (0)	60 (100)

Sumber: Data diolah, Tahun 2021

Berdasarkan hasil analisis distribusi frekuensi pada Tabel 3 dapat dilihat bahwa terdapat 60 desa yang menjadi sampel dalam penelitian ini dimana ada 27 orang atau sebanyak 45% penyusun laporan keuangan desa yang memberikan pendapat setuju kemudian terdapat 24 orang atau sebanyak 40% yang memberikan pendapat kurang setuju lalu terdapat masing-masing 4 orang atau sebanyak 6,7% yang memberikan pendapat sangat setuju dan tidak setuju dan terdapat 1 orang atau sebanyak 1,7% yang memberikan pendapat sangat tidak setuju terhadap pernyataan bagian akuntansi/keuangan telah mempunyai jumlah komputer yang cukup dalam mendukung pelaksanaan tugasnya.

Pernyataan tentang jaringan internet yang tersedia di desa sudah mendukung pelaksanaan tugas bagian akuntansi/keuangan umumnya responden memberikan pendapat setuju yaitu sebanyak 26 responden atau sekitar 43,3% kemudian memberikan pendapat kurang setuju ada 22 orang atau sekitar 36,7% lalu ada 8 orang atau sekitar 13,3% yang

memberikan pendapat sangat setuju selanjutnya 3 responden atau sekitar 5% yang memberikan pendapat tidak setuju dan 1 responden atau sekitar 1,7% yang memberikan pendapat sangat tidak setuju.

Pernyataan tentang sejak awal seluruh transaksi dalam proses akuntansi sampai dengan penyusunan laporan keuangan semuanya telah diproses secara terkomputerisasi umumnya responden memberikan pendapat kurang setuju yaitu terdapat 25 orang atau sekitar 41,7% kemudian memberikan pendapat setuju ada 23 orang atau sekitar 38,3% lalu ada 8 orang atau sekitar 13,3% yang memberikan pendapat sangat setuju selanjutnya terdapat 3 orang atau sekitar 5% yang memberikan pendapat tidak setuju dan terdapat 1 orang atau sekitar 1,7% yang memberikan pendapat sangat tidak setuju.

Pernyataan tentang penyusunan laporan keuangan merupakan hasil dari sebuah sistem informasi yang telah terintegrasi umumnya responden memberikan pendapat setuju yaitu 32 orang atau sekitar 53,3% kemudian memberikan pendapat kurang setuju ada 16 orang atau sekitar 26,7% lalu ada 10 orang atau sekitar 16,7% yang memberikan pendapat sangat setuju selanjutnya terdapat 2 orang atau sekitar 3,3% yang memberikan pendapat tidak setuju dan tidak ada yang memberikan pendapat sangat tidak setuju.

#### c. Pengendalian Intern

Pengendalian intern adalah sebuah perencanaan terdiri dari struktur organisasi seluruh metode dan peralatan yang telah dikoordinasi dengan baik dan siap diterapkan dalam sebuah organisasi. Pengendalian intern bertujuan untuk mengecek data akuntansi secara teliti dan benar meningkatkan efisiensi serta membantu untuk mematuhi kebijakan manajemen yang ada.

Beberapa indikator yang digunakan untuk mengetahui implementasi pengendalian intern adalah: otorisasi, pencatatan setiap transaksi, adanya pembagian tugas, dan kewenangan penyusunan laporan keuangan. Berikut adalah distribusi frekuensi tanggapan responden terkait dengan sistem pengendalian intern yang mendukung penyusunan laporan keuangan desa di Kabupaten Bone

**Tabel 4. Sistem Pengendalian Intern yang Mendukung Penyusunan Laporan Keuangan Desa di Kabupaten Bone**

Indikator	Frekuensi dan Persentase					Total
	SS	S	KS	TS	STS	F

	F	F	F	F	F	%
	%	%	%	%	%	
Otorisasi	7 (11,7)	37 (61,7)	15 (25)	1 (1,7)	0 (0)	60 (100)
Pencatatan setiap transaksi	7 (11,7)	28 (46,7)	23 (38,3)	2 (3,3)	0 (0)	60 (100)
Adanya pembagian tugas	10 (16,7)	23 (38,3)	20 (33,3)	7 (11,7)	0 (0)	60 (100)
Kewenangan penyusunan laporan keuangan	6 (10)	30 (50)	24 (40)	0 (0)	0 (0)	60 (100)

Sumber: Data diolah, Tahun 2021

Berdasarkan hasil analisis distribusi frekuensi pada Tabel 4 dapat dilihat bahwa terdapat 60 desa yang menjadi sampel dalam penelitian ini terdapat 37 orang atau sebesar 61,7% penyusun laporan keuangan desa yang menyatakan setuju kemudian terdapat 15 responden atau sekitar 40% yang memberikan pendapat kurang setuju lalu terdapat 7 orang atau sekitar 11,7% yang memberikan pendapat sangat setuju selanjutnya terdapat 1 orang yang memberikan pendapat tidak setuju dan tidak ada yang memberikan pendapat sangat tidak setuju terhadap pernyataan bahwa jika otorisasi tidak dilakukan oleh pihak yang mempunyai kewenangan maka petugas tidak dapat melakukan sebuah transaksi.

Pernyataan tentang bagian keuangan/akuntansi akan melakukan pencatatan secara rinci pada seluruh transaksi yang ada umumnya responden memberikan pendapat setuju yaitu ada 28 orang atau sebanyak 46,7% kemudian memberikan pendapat kurang setuju ada 23 orang atau sekitar 38,3% lalu ada 7 orang atau sebanyak 11,7% yang memberikan pendapat sangat setuju selanjutnya 2 orang atau sekitar 3,3% yang memberikan pendapat tidak setuju dan tidak ada yang memberikan pendapat sangat tidak setuju.

Pernyataan tentang terdapat pemisahan tugas dalam rangka pelaksanaan APBDesa umumnya responden memberikan pendapat setuju yaitu ada 23 orang atau sekitar 38,3% kemudian memberikan pendapat kurang setuju ada 20 orang atau sekitar 33,3% lalu ada 10 orang atau sekitar 16,7% yang memberikan pendapat sangat setuju selanjutnya terdapat 7 orang atau sekitar 11,7% yang memberikan pendapat tidak setuju dan tidak ada responden yang memberikan pendapat sangat tidak setuju.

Pernyataan tentang terdapat aparat yang diberi tugas/ wewenang dalam penyusunan laporan keuangan desa umumnya responden memberikan pendapat setuju yaitu terdapat 30

orang atau sekitar 50% kemudian memberikan pendapat kurang setuju ada 24 orang atau sekitar 40% lalu ada 6 orang atau sebesar 10% yang memberikan pendapat sangat setuju dan tidak ada yang memberikan pendapat tidak setuju dan sangat tidak setuju.

### **Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 81,7% tingkat ketepatan waktu pelaporan keuangan desa di Kabupaten Bone. Hal ini mengindikasikan jika 18,3% desa yang dalam menyampaikan laporan keuangan belum dilakukan secara tepat waktu ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti: kualitas sumber daya manusia pengelola keuangan, penggunaan teknologi informasi dan implementasi sistem pengendalian intern.

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang berkualitas ditentukan oleh pendidikan, pengetahuan, pengalaman dan keterampilan pengelola laporan keuangan berpengaruh terhadap ketepatan penyusunan laporan keuangan dalam hal ini kemampuan yang dimiliki oleh seorang aparat mulai dalam hal tingkat pendidikan, pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan untuk melaksanakan tugas pokok fungsi dan wewenangnya akan memberikan pengaruh terhadap penyampaian laporan keuangan secara tepat waktu. Hal ini sesuai apa yang disampaikan oleh Bastian (2010) bahwa diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kualitas yang tinggi terhadap penguasaan akuntansi pemerintahan dalam menyiapkan dan menyusun laporan keuangan yang baik. Dalam upaya menciptakan laporan keuangan yang baik diperlukan sumber daya manusia yang menjadi faktor utama terutama bagi mereka yang menguasai Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam menyusun laporan keuangan. SAP yang baik jika tidak dikung oleh sumber daya manusia yang memiliki kehandalan maka laporan keuangan yang baik sulit untuk diwujudkan. Hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Machfuda dan Kustiningsih (2021) memiliki hasil yang sama dengan penelitian ini yaitu kualitas sumber daya manusia yang semakin baik maka akan semakin tepat waktu dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban khususnya SPJ Pengeluaran di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur demikian juga sebaliknya kualitas sumber daya manusia yang buruk maka akan semakin tidak tepat waktu dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban khususnya SPJ Pengeluaran di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur.

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa teknologi informasi dalam hal ini kecukupan perangkat IT, dukungan jaringan internet, sistem komputerisasi, dan sistem IT yang terintegrasi berpengaruh terhadap ketepatan penyusunan laporan keuangan dimana dalam pengambilan keputusan ekonomi dibutuhkan informasi yang bersumber dari sistem informasi yang berkaitan dengan proses mulai dari pencatatan, pelaporan anggaran dan keuangan sehingga mampu membantu proses identifikasi, pengukuran hingga pelaporan transaksi. Untuk memperoleh informasi yang berkualitas maka dibutuhkan pemanfaatan teknologi informasi yang mampu melakukan indentifikasi masalah, penyelesaian masalah hingga mengevaluasi masalah sehingga dapat membantu para pihak yang berkepentingan. (Sutabri, 2014:3). Hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Noviani dan Hendarsyah (2020) memiliki hasil yang sama dengan penelitian ini yaitu Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) yang diimplementasikan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

Berdasarkan analisis deskriptif diperoleh bahwa pengendalian intern dalam hal ini struktur organisasi seluruh metode dan peralatan yang telah dikoordinasi dengan baik dan siap diterapkan dalam sebuah organisasi mampu meningkatkan penyusunan laporan keuangan secara tepat waktu. Pimpinan yang menerapkan pengendalian intern telah didesain untuk pencapaian operasional organisasi secara efektif dan efisien menghasilkan laporan keuangan yang handal serta mentaati seluruh peraturan dan peraturan peundang-undangan yang telah ditetapkan. Pengendalian intenal memiliki peran dalam hal peningkatan kinerja melalui pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel di samping itu tujuan pengendalian intern adalah untuk mengamankan aset yang ada dalam sebuah perusahaan, mengecek data akuntansi secara teliti dan benar, menciptakan efisiensi dan kebijakan manajemen yang ditetapkan dapat dipatuhi oleh setiap pengambil kebijakan (Mulyadi, 2017:42). Hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Noviani dan Hendarsyah (2020) memiliki hasil yang sama dengan penelitian ini yaitu ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis dipengaruhi oleh Sistem Pengendalian Intern (SPI).

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat beberapa desa yang masih belum tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi ketidaktepatan waktu pelaporan adalah kualitas sumber daya manusia yang merupakan faktor kunci dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, disamping itu juga teknologi informasi dan sistem pengendalian intern yang turut mendukung ketepatan penyampaian laporan keuangan

### DAFTAR PUSTAKA

- Astri Juainita, Makalalag, 2016. **Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu**. *E-Jurnal*, Universitas Sam Ratulangi: Manado.
- Baridwan, Zaki. 2014. **Intermediate Accounting**. Yogyakarta: BPFE
- Bastian, Indra, 2010. **Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar**. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Darminto, Dwi Prastowo and Rifka Julianty, 2012. **Analisis Laporan Keuangan: Konsep dan Manfaat**. AMP-YKPN, Yogyakarta.
- Kadir Abdul. 2011. Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. **Jurnal Manajemen dan Akuntansi**. Volume 12, Nomor 1, April.
- Machfuda, Mochmad Khoirul dan Kustiningsih Naniek, 2021. **Analisis Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Ketepatan Waktu Laporan SPJ Pengeluaran** (Studi Kasus pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur), *Jurnal Economics and Sustainable Development*. 6(1):53-63.
- Mulyadi, 2017. **Akuntansi Manajemen**. Edisi ketiga, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Noviani, Alwina dan Hendarsyah Decky, 2020. **Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan: Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah**. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*. 8(2):206-213.
- Purbowati Rachyu 2014. **Pengaruh Variabel-Variabel Determinan Terhadap Audit Delay dan Dampaknya Pada Reaksi Investor**. Tesis. Program Pasca Sarjana. Fakultas Ekonomi. Universitas Brawijaya.
- Raharjo, B. 2017. **Laporan Keuangan Perusahaan: Membaca, Memahami dan Menulis**. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Riduan, 2004, **Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula**, Bandung: Alfabeta.
- Ridwan S Sundjaja dan Inge Berlian, 2003, **Manajemen Keuangan**, Edisi kelima, Intan Sejati, Klaten.
- Scott, William R.2000. **Financial Accounting Theory**. USA: Prentice-Hall. Terjemahan.
- Sutabri Tata, 2014. **Analisis Sistem Informasi**, ANDI, Yogyakarta.
- Sukmawan, 2013. “Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa berdasarkan Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Studi di Desa Mergosari, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo)”. **Jurnal Hukum**. Universitas Brawijaya.